

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan dan keberagaman potensi, baik potensi alam maupun potensi budaya, hal ini karena Indonesia di lewati oleh garis khatulistiwa, namun kenyataannya Indonesia masih mengalami kemiskinan. Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekedar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme poverty*), tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini karena mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers dalam Mardikanto, 2017:25). Meskipun demikian, angka kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan, namun menurut Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi, dimana terdapat 53,5 juta jiwa dalam kondisi masih rentan, dan juga tercatat bahwa pada tahun 2019 tingkat kemiskinan di daerah perkotaan mencapai 6,69% dan di daerah perdesaan tingkat kemiskinan mencapai 12,85% (SINDONEWS.com, 2019). Dari data tersebut diketahui tingkat kemiskinan di Indonesia sebagian besar berada di perdesaan, sehingga untuk mengatasi masalah pengentasan kemiskinan tersebut, maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan (Mardikanto, 2017:25).

Berdasarkan PermenDesaPDTT Nomor 17 Tahun 2019 mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kesadaran, perilaku, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya sesuai penetapan kebijakan, kegiatan, program dan pendampingan yang tepat dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memecahkan permasalahan persoalannya sendiri, sehingga pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana dan bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sarannya, selain itu pemberdayaan harus mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia (Mardikanto 2017:102). Pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka dalam Mardikanto, 2017:26). Maka sekarang ini, pemerintah sedang mendorong daerah-daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi wilayah yang ada sebagai tempat wisata, guna menciptakan masyarakat yang mandiri.

Menurut Oka A Yoeti (2008:2) Prospek industry pariwisata di Indonesia besar dan menggembirakan mengingat pariwisata dianggap sebagai penyelamat, primadona penghasil devisa bagi negara. Seperti pula yang di kutip

dari (Laporan Akhir Passenger Exit Survey, 3 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2004 dalam Putri, 2019) bahwa penyumbang pendapatan negara salah satunya adalah pariwisata, terbukti dari krisis ekonomi nasional yang terjadi pada sektor pariwisata tetap mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian, sehingga pengelolaan sektor pariwisata sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Kemudian menurut Mubyarto (dalam Rohim, 2013) berpendapat bahwa salah satu sektor ekonomi yang mampu membuktikan pengentasan kemiskinan suatu daerah yaitu sektor pariwisata, dimana dalam pengelolaan pariwisata pasti memiliki dampak *trickle down effect* bagi masyarakat local.

Dunia kepariwisataan sekarang ini terdapat kecenderungan dalam pengelolaan potensi daerah, terutama bagi desa yaitu dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut (Mustangin, 2017) bahwa pemberdayaan dapat diwujudkan dengan berbagai program, salah satunya adalah program desa wisata. Desa wisata memiliki dampak dalam segi perekonomian suatu wilayah yang di dalamnya terdiri dari pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah (Saliman, dkk, 2019). Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata (Rohim,2013). Pembentukan desa wisata juga terus dilakukan oleh beberapa daerah untuk mendorong wilayahnya agar mampu menciptakan potensi dari daerahnya, termasuk juga daerah Jawa Tengah. Hal tersebut kemudian di dukung dengan di keluarkannya Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa tengah bahwa desa

wisata memiliki peranan yang penting dalam pemajuan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, pengoptimalisasian potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta pengangkat dan pelindung nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan penjaga kelestarian alam. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan kepada setiap desa wisata berupa siap mengucurkan dana sebesar Rp 1 Miliar. Tercatat bahwa desa wisata di Jawa Tengah yang tersebar di 35 kabupaten/kota sebanyak 229 desa (Beritasatu.com, 2019). Berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo bahwa desa wisata di Jawa Tengah harus gencar untuk dikembangkan. Seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Jateng bahwa:

“Targetnya, Jateng memiliki 500 desa wisata. Ada banyak rezeki yang bisa diambil di sana. Ada banyak kebahagiaan yang bisa kita tebar pada banyak orang. Kita akan buat Jawa Tengah untuk jadi surganya desa wisata,” ujar Ganjar ketika membuka Gelar Desa Wisata, Sabtu (20/7/2019) (dilansir dari Beritasatu.com, 19/4/2020 > <https://www.beritasatu.com/nasional/565401/nasional/565401-pemprov-jateng-dorong-pengembangan-desa-wisata>).

Desa wisata juga sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. Selain perbaikan terhadap sarana dan prasarana umum yang menjadi perhatian, PemKab Grobogan juga mulai memperhatikan sektor pariwisata yang di rasa akan memberikan pemasukan apabila dikelola dengan baik. seperti yang di ungkapkan oleh Bupati Grobogan, ibu Sri Sumarni bahwa:

“Di beberapa daerah, kontribusi dari sektor pariwisata ini cukup besar. Nah, hal ini akan coba kita tiru agar sektor pariwisata di Grobogan semakin maju dan membawa dampak positif bagi banyak pihak,” kata Bupati Grobogan Sri Sumarni (dilansir dari Murianews.com pada 19/4/2020 > <https://www.murianews.com/2016/12/24/103821/soal->

[pengembangan-sektor-pariwisata-begini-rencana-pemkab-grobogan-ke-depan.html](https://www.murianews.com/2016/12/24/103821/soal-pengembangan-sektor-pariwisata-begini-rencana-pemkab-grobogan-ke-depan.html)).

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah yang mengembangkan pariwisata, karena sebagai sektor komoditi untuk menghasilkan input pendapatan daerah. Kabupaten Grobogan dengan letak geografis berbentuk lembah yang diampit oleh dua pegunungan kapur yaitu pegunungan kendeng di bagian selatan dan pegunungan kapur utara di bagian utara membuat Kabupaten Grobogan memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikembangkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menetapkan beberapa desa untuk dijadikan sebagai desa wisata. Desa yang ditetapkan seperti Desa Banjarejo Kecamatan Gabus dan Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo yang merupakan desa dengan memiliki potensi destinasi wisata yang layak untuk dikembangkan (Di lansir dari Murianews.com pada 19/04/2020 > <https://www.murianews.com/2016/12/24/103821/soal-pengembangan-sektor-pariwisata-begini-rencana-pemkab-grobogan-ke-depan.html>).

Desa Banjarejo salah satu desa di Kabupaten Grobogan yang telah resmi menjadi desa wisata pada tahun 2016. Desa Banjarejo yang terletak di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan adalah desa yang memiliki hasil temuan fosil hewan purbakala, benda cagar budaya dan perhiasan kerajaan, sehingga Desa Banjarejo di kenal sebagai desa wisata yang memiliki potensi alam dan budaya yang sangat besar dengan memadukan wisata sejarah purbakala dan kebudayaan, nilai-nilai budaya dan kreativitas masyarakat.

Sebagai desa yang sangat tertinggal maka desa Banjarejo perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.1
Daftar Status Perkembangan Desa di Kecamatan Gabus Kab. Grobogan
Tahun 2019

No.	Nama Desa	Status Perkembangan Desa (IDM)
1.	Keyongan	Berkembang
2.	Sulursari	Maju
3.	Pandanharum	Berkembang
4.	Bendoharjo	Tertinggal
5.	Nglinduk	Berkembang
6.	Suwatu	Tertinggal
7.	Tlogotirto	Berkembang
8.	Pelem	Berkembang
9.	Tunggulrejo	Berkembang
10.	Kalipang	Berkembang
11.	Karangrejo	Berkembang
12.	Banjarejo	Sangat Tertinggal
13.	Tahunan	Berkembang
14.	Gabus	Berkembang

Sumber. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, 2019.

Pemberdayaan yang tepat untuk diterapkan di Desa Banjarejo berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 20 tentang desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa, bahwa desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan BUMDesa, pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna, dan pembentukan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan dan sejarah Desa Banjarejo maka pemberdayaan yang dilakukan di Desa Banjarejo yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata. Dengan anggaran alokasi dana desa yang diberikan untuk membangun tempat wisata sebanyak Rp 170.000.000,- kemudian pemerintah Desa Banjarejo melakukan pengembangan wisata yang sudah ada dengan menambah beberapa obyek dan membangun sarana prasarana guna menunjang kenyamanan para wisatawan. Potensi wisata awal yang dimiliki Desa Banjarejo yaitu petilasan Aji Soko yang berada di Dusun Medang dan ladang bekas pengeboran minyak colonial belanda yang berada di Dusun Nginggil serta penemuan-penemuan fosil dan benda-benda purbakala. Dengan potensi yang ada kemudian kepala Desa Banjarejo menambahkan obyek-obyek wisata yaitu taman ganesha tidur, omah balung, rumah fosil, dan museum lapangan yang berada di lingkungan kantor kepala desa yang merupakan akses fisik yang diberikan pemerintah Desa Banjarejo kepada masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Akses fisik lainnya yaitu pemerintah Desa Banjarejo menyediakan pasar desa yang berada di depan kantor kepala desa, sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke pasar tersebut. Dengan disediakan beberapa akses tersebut diharapkan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi Desa Banjarejo. Dalam hal ini, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan desa wisata.

Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata diaplikasikan Desa Banjarejo melalui destinasi-destinasi wisata yang ada guna mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

Destinasi wisata di desa wisata Banjarejo lahir karena adanya beberapa keistimewaan, keunikan dan persoalan yang terdapat di dalam desa. Destinasi rumah fosil Banjarejo lahir karena di pelopori oleh kepala Desa Banjarejo, yang melihat potensi desa dengan kekayaan alamnya, salah satunya adalah temuan-temuan fosil yang berada di Desa Banjarejo tersebut. Di mana awal pembentukan desa wisata di Desa Banjarejo karena belum terciptanya sarana untuk menampung terkait temuan fosil-fosil dan benda-benda bersejarah tersebut sehingga membuat masyarakat di Banjarejo menjual temuannya kepada kolektor-kolektor benda antic dari luar desa (Santoso dalam Dwi Perdana Syah, 2019:3). Dalam hal ini, kemudian mendorong penggiat desa wisata Banjarejo yaitu komunitas peduli fosil Desa Banjarejo dengan memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat supaya mereka mampu menjaga dan melestarikan peninggalan fosil purbakala maka hadirilah rumah fosil yang merupakan bentuk dari pemberdayaan masyarakat di desa Banjarejo karena terdapat keterlibatan masyarakat didalamnya. Dengan adanya rumah fosil masyarakat dilarang untuk menjual temuan-temuan fosil kepada kolektor-kolektor benda antic sehingga mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, pemerintah desa bekerjasama dengan arkeolog mengajak masyarakat dalam penelitian maupun dalam pencarian benda-benda fosil yang ada di desa Banjarejo, hal ini agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan kehilangan mata pencaharian mereka.

Destinasi patung ganesa tidur yang merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah Grobogan dalam pengoptimalan desa wisata ini, dimana

patung ini ialah ciri dari desa wisata ini. Hal ini dilatarbelakangi karena bentuk dari pengenangan kehidupan era animisme, hindu dan budha yang pernah ada di Desa Banjarejo dan juga banyaknya penemuan benda purbakala yang di dominasi dari jenis gajah purba. Patung ganesa tidur ini menjadi daya tarik pengunjung wisata banjarejo untuk berkunjung ke Desa Banjarejo. Seperti yang di tuturkan oleh bapak Achmad Taufik, kepala Desa Banjarejo:

“kita pilih buat patung Ganesa dilakukan dengan latar belakangnya seperti itu. di luar dugaan, pembuatan patung ini ternyata dapat respon positif dari warga. Setiap hari, banyak yang selfie di depan patung itu. Bahkan sebelum pembuatannya rampung juga sudah banyak yang foto-foto”, tutur kepala desa. 03/11/2020.

Destinasi patung jerami atau festival jerami. Festival jerami merupakan salah satu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber daya yang ada yaitu berupa jerami hasil panen padi sehingga pada peringatan dua tahun usia desa wisata Banjarejo di buka lah festival jerami dan dilakukan setaip tahun, dimana jerami hasil dari panen masyarakat yang awalnya hanya sebagai tumpukan jerami didepan rumah yang dijadikan sebagai makanan ternak warga, kemudian di sulap menjadi karya yang sangat luar biasa yaitu menjadi patung jerami dengan berbagai bentuk seperti replika gorilla, singa, gajah, manusia purba, dan lain-lain yang dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata di Desa Banjarejo. Festival jerami ini di ikuti oleh warga desa Banjarejo dan warga desa sekitar, yang mana dalam festival jerami tersebut menghabiskan 10 ton jerami untuk pembuatan berbagai binatang jerami. Festival jerami ini di jadikan ajang perlombaan sehingga masyarakat yang mengikuti akan mendapatkan hadiah uang. Selain itu, festival jerami ini

juga menjadi icon yang ditunggu-tunggu oleh pengunjung sehingga ketika festival berlangsung desa wisata banjarejo akan dipenuhi wisatawan (kegiatan ini dilakukan sebelum adanya pandemi covid-19), seperti yang di ungkapkan oleh kepala Desa Banjarejo, mengatakan bahwa:

“Kegiatan ini, dalam rangka hari jadi Desa Wisata yang kedua. Festival jerami ini kami selenggarakan lantaran, 99 persen penduduk Desa Banjarejo merupakan petani. Jadi setelah masa tanam pertama banyak jerami yang akhirnya hanya menjadi abu karena dibakar” kepala desa Banjarejo (dilansir dari ayosemarang.com, 2018 pada 19/04.2020 > <https://www.ayosemarang.com/read/2018/10/12/37084/kali-pertama-festival-jerami-digelar-di-grobogan>)

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Tanah Tahun 2017 (Hektar)

No	Desa	Jenis Tanah		
		Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1.	Keyongan	124	2886	3011
2.	Suwatu	50	3054	3104
3.	Nglinduk	74	1947	2020
4.	Pelem	366	940	1306
5.	Sulusari	94	152	246
6.	Tlogotirto	294	570	819
7.	Gabus	185	231	416
8.	Pandanharum	256	1335	1591
9.	Tunggulrejo	368	343	711
10.	Tahunan	358	366	724
11.	Bandoharjo	412	189	601
12.	Kalipang	378	113	492
13.	Karangrejo	306	125	432
14.	Banjarejo	679	385	1064
	Jumlah	3901	12636	16537

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2018

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Grobogan 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 tercatat bahwa desa Banjarejo merupakan desa di Kecamatan Gabus yang memiliki tanah sawah terluas yaitu 679 Hektar dan tanah kering seluas 385 Hektar, yang artinya bahwa Desa Banjarejo

memiliki potensi penghasil jerami terbanyak di Kecamatan Gabus. Dari hasil jerami yang melimpah maka muncul lah festival jerami yang diadakan oleh Desa Banjarejo.

Gambar 1.1
Hasil Karya Festival Jerami Gorila



Sumber : Akurat.co, 2018

Gambar 1.2
Hasil Karya Festival Jerami Manusia Purba



Sumber : Akurat.co, 2018

Desa Banjarejo yang telah resmi menjadi desa wisata mendorong pemerintah desa untuk memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga sebagai sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat

melalui desa wisata ini. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan oleh Desa Banjarejo guna meningkatkan potensi masyarakat dalam mendukung desa wisata yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarejo

No	Nama Pemberdayaan	Tahun	Pencetus	Hasil	Keberhasilan
1.	Sosialisasi dan pemberian pengetahuan kepada masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah purbakala.	2016	Para pengiat desa wisata Banjarejo	Keberadaan rumah fosil.	Sekitar 500 koleksi fosil yang tersimpan di Rumah Fosil Desa wisata Banjarejo
2.	Pelatihan UMKM	2016	Pemerintah desa	Pendirian usaha kecil di sekitar tempat wisata.	Ibu-ibu yang mengikuti pelatihan sebanyak 35 namun hanya terdapat 7 orang yang mendirikan usaha dan hingga sekarang tinggal 3 orang yang bertahan.
3.	Pelatihan keahlian photography kepada pemuda desa	2017	Kelompok sadar wisata desa Banjarejo	Kemampuan pemuda dalam membranding desa dengan menyajikan video-video pendek tentang wisata dan kegiatan di desa Banjarejo.	Dari keseluruhan pemuda yang mengikuti pelatihan hampir semua mampu mengedit video, namun hasil dari pelatihan photography hanya berjalan efektif ketika terdapat acara festival saja.

4.	Pelatihan kewirausahaan	2018	Mahasiswa KKN Undip 2018	Memberikan keterampilan kepada ibu-ibu dalam usaha agrowisata dan marchendais.	Terciptanya rumah souvenir cendramata desa wisata banjarejo
----	-------------------------	------	--------------------------	--	---

Sumber : Hasil Wawancara Komunitas Informasi Masyarakat, 2020.

Dari pemberdayaan yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pemberian pengetahuan kepada masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah purbakala sudah dikatakan berhasil karena sekitar 500 koleksi fosil tersimpan di Rumah Fosil desa wisata Banjarejo yang artinya masyarakat tidak lagi menjual hasil temuan ke kolektor namun sudah mulai menyimpan ke Rumah Fosil. Selain itu, masyarakat juga diikutsertakan dalam penelitian dan pencarian benda purbakala yang berada di Desa Banjarejo bersama para arkeolog, hal ini agar masyarakat merasa tidak kehilangan mata pencaharian mereka, seperti yang di ungkapkan oleh kepala Desa Banjarejo bahwa:

“Masyarakat ikut dilibatkan ketika ada arkeolog yang meneliti dan mencari penemuan benda purbakala disini, tujuannya agar masyarakat merasa tidak dirugikan. Dengan masyarakat dilibatkan mereka tetap menghasilkan uang, tanpa harus menjual benda-benda temuan mereka kepada para kolektor-kolektor benda antic”. Ungkap kepala desa Desa Banjarejo, Selasa, 3/11/20.

Pelatihan UMKM dapat dikatakan belum berhasil karena dari 35 ibu-ibu yang mengikuti pelatihan hanya 7 yang mendirikan usaha dan sampai sekarang tersisa 3 orang yang bertahan, seperti yang di ungkapkan kepada desa Desa Banjarejo bahwa:

“Pelatihan UMKM ini merupakan bekal keterampilan untuk ibu-ibu. Dengan adanya desa wisata ini, masyarakat banyak yang memanfaatkan situasi dengan berdagang, seperti ketika ada festival terdapat sekitar 100 lebih orang berjualan. Tapi ketika hari biasa terdapat 7 orang yang berjualan di sekitar sini, tapi di kondisi pandemi seperti ini tersisa 3 pedagang yang masih bertahan”. Ungkap kepala Desa Banjarejo, Selasa, 03/11/2020.

Pelatihan keahlian photography kepada pemuda desa sudah dikatakan berhasil karena dari keseluruhan pemuda yang mengikuti pelatihan hampir semua mampu mengedit video. Namun, pelatihan keahlian photography belum efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat karena hasil dari pelatihan photography hanya berjalan ketika terdapat acara festival saja. Pelatihan keahlian photography ini bertujuan agar pemuda mampu membranding desa wisata banjarejo sebagai akses mempromosikan desa wisata.

Pelatihan kewirausahaan dikatakan berhasil karena mampu menciptakan rumah souvenir cendramata desa wisata Banjarejo namun keberadaan rumah souvenir cendramata desa Banjarejo berjalan singkat. Pemberdayaan desa masyarakat melalui desa wisata yang berada di Desa Banjarejo masih begitu kurang karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat, seperti yang di ungkapkan oleh mas Fuad yang merupakan salah satu pengurus Komunikasi Informasi Masyarakat bahwa pemberdayaan di desa Banjarejo yaitu: “Rasa tumbuh untuk bergerak kurang banget, PSDM juga masih kurang” Jumat 05/06/2020. Artinya tingkat partisipasi masyarakat masih kurang. Hal tersebut karena masyarakat yang lebih memilih bertahan dengan mata pencahariannya. Masyarakat Desa Banjarejo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, karyawan swasta, wiraswasta, dan lain-

lain (Pelatihan Pemberdayaan ini dilakukan sebelum adanya pandemic covid-19).

Semenjak Desa Banjarejo ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2016 diperoleh data statistic dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Grobogan dimana Desa Wisata Banjarejo merupakan desa wisata yang memiliki jumlah wisatawan yang cukup banyak. Hal ini merupakan desa wisata yang diminati dari beberapa desa wisata lainnya. Di bawah ini adalah data jumlah wisatawan di Desa Banjarejo dari Disporabudpar di Tahun 2020.

Tabel 1.4
Jumlah wisatawan di desa wisata Banjarejo

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	132.920 orang
2.	2018	137.792 orang
3.	2019	135.360 orang

Sumber. Data DISPORABUDPAR, 2020.

Melihat tabel data statistic dari Disporabudpar Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa pengunjung Desa Wisata Banjarejo pada tahun 2017 sebanyak 132.920 orang, pada tahun 2018 sebanyak 137.792 orang, pada tahun 2019 sebanyak 135.360 orang. Hal ini, menunjukkan bahwa potensi Desa Wisata Banjarejo yang merupakan peninggalan sejarah tidak kalah dengan desa wisata lainnya. Banyaknya pengunjung wisatawan yang datang ke Desa Wisata Banjarejo memberikan manfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan penghasilan. Berdasarkan jumlah pengunjung yang berkunjung ke Desa Wisata

Banjarejo tidak terlepas dari peran partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Desa Wisata Banjarejo. (Data jumlah pengunjung wisatawan dilihat sebelum adanya pandemic covid-19).

Dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang dilakukan oleh Desa Banjarejo sudah mampu mempekerjakan masyarakat sebanyak 91 orang yaitu pokdarwis sebanyak 15 orang, komunitas peduli fosil sebanyak 15 orang, pembuat patung jerami sebanyak 50 orang, penjual sebanyak 7 orang, tukang parkir sebanyak 2 orang dan tukang karcis sebanyak 2 orang. Namun demikian, pekerja desa wisata Desa Banjarejo tidak setiap hari bekerja (jumlah pekerja di desa wisata banjarejo dilihat sebelum adanya pandemic covid-19). Hal ini karena, jumlah wisatawan yang tidak menentu setiap harinya. Selain itu, untuk tenaga kerja pembuat patung jerami dan komunitas peduli fosil di pekerjakan hanya ketika mendapat tawaran seperti komunitas peduli fosil digunakan ketika ada kerjasama dengan arkeolog untuk mencari fosil yang ada di kawasan desa sehingga komunitas peduli fosil diajak untuk membantu. Pembuat patung jerami dikerjakan juga ketika mendapat tawaran job, seperti kerjasama dengan BPJB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya membuat pameran patung jerami di Prambanan, Yogyakarta.

Tabel 1.5
Tenaga Kerja Desa Wisata Banjarejo

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pokdarwis	15 orang
2.	Komunitas peduli fosil	15 orang
3.	Pembuat patung jerami	50 orang

4.	Penjual	7 orang
5.	Tukang parker	2 orang
6.	Penjaga karcis	2 orang

Sumber. Hasil Wawancara bapak kepala desa, Desa Banjarejo, 2020.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, hal ini terlihat dari masyarakat yang masih memilih bertahan dengan pekerjaannya. Masyarakat di Desa Banjarejo bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, karyawan swasta, wiraswasta, dan lain-lain, seperti yang di ungkapkan ibu Sulastri, selaku penjaga kebersihan desa wisata di Banjarejo, bahwa:

“Dampak dari desa wisata kalau dari segi ekonomi ya kalau ramai saja mbk, seperti kalau ada event-event gitu pasti ramai, tapi kalau seperti pandemic dan tidak hari libur ya sepi, jadi masyarakat tidak bisa bergantung dari wisata disini mbk. Kan rata-rata masyarakat disini bekerja di pabrik, berdangang gitu mbk”. Ungkap ibu Sulastri, 26/10/2020.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat, selain adanya dukungan dari pemerintah dan potensi yang ada, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan. Namun demikian, partisipasi masyarakat di Desa Banjarejo masih belum optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa wisata. Selain itu akses fisik berupa lokasi yang jauh dari jangkauan jalan utama membuat desa wisata di Desa Banjarejo menjadi sedikit yang mengetahuinya.

Berangkat dari beberapa permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo. Penelitian ini melihat dari indicator-indikator keberhasilan

pemberdayaan yang dinilai belum sepenuhnya berhasil dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, serta faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

1. Manfaat secara umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan menambah wawasan bagi berbagai literature mengenai pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata.

2. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Grobogan dan sebagai evaluasi mengenai pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, dan untuk pemerintah Desa Banjarejo agar lebih optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat agar tercapai sesuai dengan target/tujuan yang telah ditetapkan.

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pengetahuan dan juga pemahaman bagi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian terdahulu

Table 1.6
Penelitian terdahulu

No (1)	Peneliti, Tahun (2)	Tujuan Penelitian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Penelitian (5)	Perbedaan (6)
1.	Admaja, Tyas Kusumah, dkk. Desa Wisata Pentingsari; Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata. 2020.	Menganalisis proses pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Pentingsari dan faktor yang mempengaruhinya.	Metode penelitian kualitatif	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Pentingsari berjalan dengan optimal, namun masih banyak pembenahan. Faktor penghambat: - Partisipasi masyarakat kurang - Rendahnya kepedulian lingkungan.	Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dari segi pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan di masyarakat. (penelitian ini di jadikan acuan peneliti dalam melihat faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>- Masyarakat yang tidak sepakat dengan adanya Desa Wisata.</p> <p>Faktor pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari pemerintah - Potensi desa 	
2.	<p>Andriyani, Anak Agung Istri, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). 2017.</p>	<p>Memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan social budaya wilayah.</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>	<p>Proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya.</p> <p>Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat yaitu:</p>	<p>Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata terhadap perekonomian masyarakat sedangkan penelitian terdahulu melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata terhadap ketahanan social budaya wilayah. (penelitian ini dijadikan acuan dalam melihat proses pemberdayaan masyarakat oleh peneliti)</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.</p> <p>Kendala-kendala pemberdayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan budaya dan adat istiadat. 2. Sikap masyarakat. 3. Terbatasnya SDM. <p>Kurangnya ketersediaan akomodasi dalam promosi.</p>	
3.	Destiningrum, Dwiyanti, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata (Studi Kasus di Desa.	Mengkaji proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kadisosbo II.	Metode penelitian kualitatif.	<p>Proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kadisosbo II dengan melalui tiga tahapan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyadaran, 	Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata tidak hanya mengkaji proses pemberdayaan masyarakat saja, tetapi juga factor

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>2) Pengkapasitasan, 3) Pendayaan.</p>	<p>penghambatan pemberdayaan masyarakat.(penelitian ini dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melihat proses pemberdayaan masyarakat)</p>
4	<p>Octaviana, Rica dan Hardi Warsono. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 2019.</p>	<p>Menganalisis upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokdarwis Desa Menari dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>	<p>Upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Pokdarwis tetapi ada juga pihak lain yang terlibat yaitu pemerintah Desa Ngrawan, Kantor Pariwisata, Perusahaan Astra, dan Universitas Sultan Agung.</p> <p>Faktor pendukung: 1. Sumber Daya Manusia. 2. Lingkungan.</p>	<p>Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dengan mengkaji proses pelaksanaan dan factor penghambat, sedangkan penelitian terdahulu melihat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dengan mengkaji factor. faktor yang mempengaruhinya. (penelitian ini dijadikan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Faktor penghambat: 1. Tingkat pendidikan masyarakat rendah. 2. Ketergantungan figur. 3. Pekerjaan di luar desa. 4. Fakor organisasi.	rujukan penulisan oleh peneliti untuk teori factor penghambat pemberdayaan masyarakat)
5.	Saliman, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata: Studi Kasus di Desa Wisata Brajan, Sleman Yogyakarta. 2019.	Mengetahui pemberdayaan pemerintah desa Brajan dalam mengembangkan desa wisata.	Metode penelitian kualitatif.	Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa pembuatan kerajinan bambu.	Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dengan mengkaji penguatan icon wisata berupa icon festival jerami untuk menarik wisatawan sedangkan peneliti terdahulu melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dengan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membuat kerajinan bambu. (penelitian ini dijadikan acuan peneliti dari segi pengembangan keterampilan masyarakat)</p>
6.	<p>Lastiani,et.al. <i>Community Empowerment Strategy: Ecospa Tourism Prospects in Nglanggeran Tourism Village Gunung Kidul Yogyakarta.</i> 2019.</p>	<p>Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pemberdayaan berbasis masyarakat pariwisata.</p>	<p>Metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Keberhasilan pemberdayaan masyarakat terlihat dari tercapainya tujuan komunitas pemberdayaan, yaitu lembaga yang lebih baik, bisnis yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, lebih baik kehidupan, dan</p>	<p>Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dengan membahas proses pelaksanaan dan factor penghambat pemberdayaan masyarakat, sedangkan peneliti terdahulu melihat pemberdayaan masyarakat dengan membahas factor-faktor yang menyebabkan keberhasilan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				komunitas yang lebih baik.	pemberdayaan berbasis masyarakat pariwisata.(penelitian ini dijadikan acuan peneliti dari segi factor pemberdayaan)
7.	Purnomo, Singgih, et.al. <i>Empowerment Model for Sustainable Tourism Village in an Emerging Country</i> . 2019.	Menguji model pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata berkelanjutan di Indonesia.	Metode kualitatif.	Menemukan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan di Desa Ponggok menggunakan empat pendekatan yaitu (1) spasial, (2) sektoral, (3) sumberdaya manusia, (4) penggunaan teknologi informasi.	Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dengan mengkaji berdasarkan studi kasus, yaitu festival jerami yang berada di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Sedangkan peneliti terdahulu mengkaji pemberdayaan masyarakat dengan menguji model pemberdayaan masyarakat.(penelitian ini di jadikan peneliti dari segi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pengembangan desa wisata)

8.	Aghazamani, Yeganeh, et.al. <i>Women's Perceptions of Empowerment in Ramsar, a Tourism Destination in Northern Iran</i> . 2020.	Mengungkapkan perempuan Iran persepsi keseluruhan pemberdayaan laki-laki dan apakah perbedaannya berdasarkan pada pekerjaan(yaitu pariwisata vs non pariwisata, termasuk ibu rumah tangga).	Metode kualitatif	Wanita berbeda persepsi tentang pemberdayaan ketika pekerjaan dan tingkat pemberdayaan dianggap dipertimbangkan. Wanita menganggap diri mereka sebagai diberdayakan.	Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata berdasarkan kondisi geografis dan demografi, sedangkan peneliti terdahulu melihat pemberdayaan dari pekerjaan dan jenis kelamin. (penelitian ini di jadikan acuan dari segi pemberdayaan kepada masyarakat perempuan).
----	---	--	-------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Li, Ji, et.al. <i>Community Participation in Cultural Heritage Management: A Systematic Literature Review Comparing Chinese and International Practices</i> . 2019.	Mengeksplorasi perbedaan berdasarkan empat tema: masyarakat yang terlibat, metode partisipatif, tingkat partisipatif dan langkah-langkah yang diambil dalam pengelolaan warisan budaya.	Metode kualitatif	Cina didorong untuk belajar dari praktik internasional ketika mengembangkan pendekatan manajemen kontekstual, untuk lebih baik menghadapi tantangan cepat urbanisasi.	Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dari proses dan factor penghambat pemberdayaan masyarakat, sedangkan peneliti terdahulu mengkaji dengan mengeksplorasi perbedaan berdasarkan tema. (penelitian ini dijadikan acuan peneliti dari segi factor hambatan yaitu pada pekerjaan diluar desa)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Sutawa, Gusti Kade. <i>Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development</i> . 2012.	Menunjukkan bagaimana pemberdayaan masyarakat local dimungkinkan melalui pariwisata.	Metode Kualitatif	Pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, komunitas pariwisata dikembangkan akan berpartisipasi dalam menjaga budaya dan alam mereka sehingga pada akhirnya pembangunan pariwisata berkelanjutan akan tercapai dan dipelihara.	Peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dengan membuat desa wisata untuk melakukan pemberdayaan, sedangkan peneliti terdahulu melihat pemberdayaan masyarakat local yang dimungkinkan melalui pariwisata. (penelitian ini dijadikan acuan peniliti dari segi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata)

Dari penelitian terdahulu di atas peneliti mengambil penelitian Admaja, Tyas Kusuma, dkk. Desa Wisata Pentingsari; Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata. 2020, sebagai acuan dalam melihat dari segi proses pemberdayaan masyarakat. Desa wisata Pentingsari yang hampir memiliki kemiripan dengan desa wisata Banjarejo yaitu mengangkat peninggalan

sejarah dan potensi alam untuk dikembangkan sebagai desa wisata, serta memiliki kesamaan dalam beberapa faktor dilapangan. Dan penelitian-penelitian terdahulu lainnya juga sebagai sumber acuan penulis.

1.5.2 Administrasi publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dari definisi tersebut, melihat pada proses pengorganisasian dan pengkoordinasian dalam membuat kebijakan publik, dimana sumberdaya dan personel sebagai aktor.

Barton & Chappel (dalam Keban, 2014:5) melihat bahwa administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana penjelasan tersebut lebih menekankan kepada aspek keterlibatan personil yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6) mengatakan bahwa batasan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik menurut Henry melihat bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih responsive.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Syafie, 2006:24) yang mengatakan bahwa administrasi publik merupakan administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Definisi ini lebih menekankan pada pencapaian tujuan dari organisasi pemerintahan.

Dimock, Dimock, & Fox (dalam Keban, 2014:5) berpendapat bahwa administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Dari pengertian tersebut lebih melihat administrasi publik sebagai pembuat kebijakan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Dari beberapa definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah suatu sistem yang saling bekerjasama dalam melaksanakan kebijakan publik guna memberikan pelayanan kepada publik, dimana pemerintah sebagai pemberi pelayanan, dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah sudut pandang, nilai, strategi, standar esensial, atau cara menangani suatu masalah yang dianut oleh masyarakat lokal pada waktu tertentu (Kuhn dalam Keban, 2014: 31). Dengan asumsi perspektif tertentu diuji dari perspektif eksternal dan menghadapi keadaan krisis atau *anomalies*, maka pada saat itu,

kepercayaan dan otoritas sudut pandang itu akan kabur atau berkurang. Sebanding dengan perkembangan ilmu manajemen kebijakan, *anomalies* tersebut beberapa kali terjadi dan harus terlihat dalam dampak nyata dari pandangan lama dengan yang disempurnakan, seperti yang diungkapkan oleh Nicholas Henry (dalam Keban, 2014: 31). Nicholas Henry (dalam Keban, 2014: 31) mengungkap bahwa norma disiplin logis, sebagaimana dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski, memasukkan konsentrasi dan lokus. Dari dua kelas disiplin tersebut, Henry menemukan bahwa ada lima standar dalam organisasi negara, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1) Paradigma ke-1 (1900-1926) Dikotomi politik dan administrasi

Paradigma ke 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradig Dikotomi politik dan administrasi. Tokoh-tokoh paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Konsekuensi dari paradigma ini adalah bahwa organisasi harus dipandang sebagai suatu nilai yang bebas dan terkoordinasi untuk mencapai efektivitas dan nilai moneter dari *government bureaucracy*. Sayangnya, paradigma ini hanya menggarisbawahi perspektif "lokus" lebih tepatnya *government bureacracy*, namun konsentrasi atau strategi yang harus dibuat dalam administrasi publik tidak diperiksa secara wajar dan pasti.

2) Paradigma ke-2 (1927-1937) Prinsip-Prinsip Administrasi.

Paradigma ke-2 (1927-1937) dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Tokoh-tokoh populer dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick dan Urwick yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka mempresentasikan prinsip administrasi sebagai titik fokus manajemen publik. Prinsip-prinsip dalam POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) ini bersifat umum. Sementara itu, lokus implementasi kebijakan tidak pernah jelas karena mereka menyatakan bahwa standar ini dapat diterapkan di mana saja, mengingat untuk asosiasi pemerintah. Oleh karena itu, dalam pandangan dunia ini pusat lebih ditekankan daripada lokus.

3) Paradigma ke-3 (1950-1970) Administrasi Negara sebagai Politik.

Paradigma ke-3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai masalah Politik. Beberapa ahli telah menegur cara administrasi publik yang benar-benar hipotesis politik. Dengan demikian, muncul paradigma lain yang menganggap administrasi publik sebagai teori politik di mana lokusnya adalah birokrasi pemerintah, sementara pusatnya

dikaburkan mengingat fakta bahwa prinsip administrasi publik mengandung banyak kekurangan.

- 4) Paradigma ke-4 (1956-1970) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi.

Paradigma ke-4 (1956-1970) adalah administrasi publik sebagai Ilmu administrasi. Dalam paradigma ini, aturan-aturan manajemen yang telah dikenal sebelumnya, ditumbuhkan secara deduktif dan luar dan dalam. Dua arah perbaikan terjadi dalam paradigma ini, khususnya yang diatur ke arah kemajuan disiplin psikologi social, dan berorientasi pada kebijakan publik. Semua pusat yang dibuat di sini dianggap relevan dalam dunia bisnis dan juga dalam bidang administrasi publik. Oleh karena itu, lokus menjadi kacau.

- 5) Paradigma ke-5 (1970-Sekarang) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik.

Paradigma ke-5 (1970-Sekarang) disinggung sebagai administrasi publik sebagai Studi administrasi publik. Administrasi publik lebih berpusat di sekitar domain ilmu kebijaksanaan (*policy science*) dan bagaimana mengukur efek samping dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat, bagian pertimbangan ini dapat dianggap sebagai hubungan antara titik fokus administrasi publik dan lokusnya. Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang tidak salah lagi. Focus dalam paradigma

ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan teori kebijakan publik. Lokus sebenarnya adalah isu dan kepentingan publik dalam masalah kebijakan publik.

Dapat disimpulkan bahwa paradigma yang dipakai adalah paradigma ke 5 yakni Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik. Karena fokusnya pada manajemen public, yakni pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dan locusnya di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

1.5.4 Manajemen publik

Menurut George Terry (dalam Syafiie, 2006:49) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan lainnya.

Berdasarkan pendapat Prajudi (dalam Syafiie, 2006:49) manajemen adalah kontrol dan penggunaan semua faktor dan sumber daya yang sesuai pengaturan, diharapkan untuk mencapai atau menyelesaikan prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Ordway Tead (dalam Syafiie, 2006:49) mengatakan manajemen merupakan proses dan perangkat yang

mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu seni mengatur dan menggerakkan orang lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan yang ditentukan. Sedangkan manajemen public merupakan sebuah media /actor penentu yang mempunyai peran dalam menjawab permasalahan social dan hal ini dilaksanakan dengan bentuk perbaikan serta menjalankan setiap amanah rakyat sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat. Focus dari manajemen public yaitu strategi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan eksternal dan misi & tujuan organisasi. Locus manajemen public tidak hanya dilaksanakan pada konteks pemerintahan, maka dari itu dapat pula dikatakan bahwa organisasi apapun yang mengatur dan melayani public merupakan organisasi public dan harus menggunakan konsep pelayanan public maupun manajemen publik. Sehingga penerapan manajemen public telah sesuai dengan kasus yang diambil peneliti mengenai pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

1.5.5 Pemberdayaan masyarakat

1.5.4.1 Pengertian Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut (Maryani & Nainggolan, 2019:8) merupakan proses pembentukan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan proses kegiatan sosial dengan maksud untuk membenahi situasi serta kondisi diri sendiri.

Menurut (Handini, Sukesi, dan Astuti, 2019: 56) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas, memberdayakan keberanian dan kesiapan, dan membuka kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat (dosmetic) untuk terlepas dari bantuan luar menumbuhkan kebebasan mereka untuk terwujud kesejahteraan (finansial, sosial, fisik dan mental) secara terkendali.

Menurut Merrian Webster (dalam Maryani & Nainggolan, 2019:1), pemberdayaan masyarakat adalah hal penting untuk memperoleh kepedulian dari seluruh elemen bangsa, baik dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat.

Menurut Wasistiono (dalam Maryani & Nainggolan, 2019:1), pemberdayaan msyarakat adalah melepaskan seseorang dari kendali yang beku, dan memberikan

kebebasan kepada orang untuk bertanggung jawab terkait ide, tindakan, serta keputusan yang di ciptakan.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999:29) bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu 1) membangun lingkungan yang memungkinkan kemampuan daerah untuk berkreasi (empowering), 2) memperkuat potensi dan kekuatan daerah. daerah lokal (enabling), 3) memberikan jaminan (securing), dimana pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memperluas kapasitas daerah untuk mengakui kebebasan dan melepaskan diri dari kebutuhan dan keterbelakangan.

Dari beberapa pengertian para ahli, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah pemberian daya/ kekuatan kepada seseorang untuk menciptakan sebuah ide/ gagasan dan keterampilan agar memiliki kekuatan dalam membuat perubahan dan menjawab permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mampu hidup mandiri dan terbebas dari keterbelakangan dan kemiskinan.

1.5.4.2 Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat

Menurut Widjajanti (2011:18) keberdayaan masyarakat merupakan adanya daya, kemampuan atau kekuatan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi

serta masalah dalam menentukan pemecahan secara mandiri, yaitu melalui pengukuran dari tiga aspek, diantaranya:

- 1) kemampuan dalam pengambilan keputusan,
- 2) kemandirian, dan
- 3) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

Menurut Suhendra (2006: 86) mengungkapkan indikator pemberdayaan masyarakat Antara lain : 1) memiliki kemampuan menyiapkan dan mengungkapkan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat, 2) mampu berjalan “*botton-up planning*”, 3) kemampuan dan aktivitas ekonomi, 4) kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, 5) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Menurut Schuler, Hashemi dan Riley dalam (Edi Suharto: 2005:63) menyatakan bahwa indikator pemberdayaan , yang mereka sebut dengan *empowerment indek* atau indeks pemberdayaan adalah:

- 1) Kebebasan mobilitas, adalah kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil, adalah kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.

- 3) Kemampuan membeli komoditas besar, adalah kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, adalah memiliki kemampuan dalam membuat keputusan dalam keluarga.
- 5) Kebebasan relative dari dominasi keluarga.
- 6) Kesadaran hukum dan politik.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 147-152) mengatakan bahwa terdapat empat dimensi yang menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pemberdayaan. Empat dimensi tersebut yaitu:

- 1) Akses. Dimensi ini terkait dengan target yang diberdayakan pada akhirnya memiliki akses akan risorsis yang diperlukannya untuk mengembangkan diri. Kesetaraan dalam mendapatkan akses ke sumber daya yang ada sangat diperlukan serta dalam mendapat manfaat yang dihasilkan dari pemberdayaan. Tidak adanya akses berdampak pada pemberdayaan menjadi tidak terlaksana. Salah satu

dampak dari tidak adanya akses yang dimiliki yaitu terjadinya kesenjangan di masyarakat.

- 2) Partisipasi adalah keikutsertaan dari masyarakat dalam berbagai kegiatan program pemberdayaan yang ada, sehingga masyarakat ikut berperan serta dalam setiap keputusan yang diambil.
- 3) Kontrol merupakan proses pengamatan atau pengawasan kegiatan secara berkelanjutan agar sesuai dengan rencana.
- 4) Kesejahteraan adalah tolak diukur masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar manusia.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999:138-139), mengungkapkan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu mencakup:

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- 4) Meningkatkan kemandirian kelompok yang di tandai dengan makin berkembangnya usaha produktif

anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya system administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

- 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan social dasarnya.

Dari beberapa indicator keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Maka dalam penelitian ini teori yang akan di gunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 147-152) untuk mengukur pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

1.5.4.3 Faktor Pendorong Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2013:188) mengatakan bahwa faktor pendorong pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

- 1) Sumber daya alam (SDA).
- 2) Sumber daya manusia (SDM).
- 3) Keadaan kelembagaan.
- 4) Sarana dan prasarana.

- 5) Kebijakan.
- 6) Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan faktor pendorong menurut Mardikanto (2013:188) yang sesuai berdasarkan kondisi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo yaitu sumber daya alam (SDA), sarana dan prasarana serta kebijakan.

1.5.4.4 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Arsiyah (2009:374) menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dalam pemberdayaan diantaranya yaitu:

- 1) Terbatasnya sumberdaya manusia.
- 2) Tidak tersedianya bahan baku.
- 3) Keterbatasan kemampuan manajerial.
- 4) Tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki.

Sedangkan hambatan eksternal dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

- 1) Akses kelompok usaha bersama (KUB) sebagai mitra pemerintah sebagai jembatan pemerintah dengan pengusaha kurang optimal.
- 2) Belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli di atas mengenai factor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, peneliti merujuk pada teori Arsiyah (2009:374) yaitu terbatasnya sumberdaya manusia, keterbatasan kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki, serta belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.5.6 Desa wisata

Desa wisata menurut Chafid Fandeli (dalam Sulistyadi, et al., 2019:56-57) menjabarkan desa wisata adalah suatu wilayah perdesaan yang mempromosikan keseluruhan suasana yang menggambarkan keaslian desa, baik dari sisi adat istiadat, budaya, sosial, aktifitas keseharian, struktur tata ruang desa, arsitektur

bangunan, serta potensi yang dapat dibangun untuk daya tarik wisata.

Desa wisata menurut (Sulistiyadi et al., 2019:57) mengungkapkan bahwa desa wisata adalah sebuah bentuk integrasi antara akomodasi, atraksi, serta fasilitas pendukung yang dipersembahkan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang melekat dengan tradisi dan tata cara yang berlaku.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) (Sulistiyadi et al., 2019:57-58) mengatakan desa wisata adalah daerah wisata yang menyiapkan keseluruhan suasana yang melintaskan keaslian perdesaan baik dari segi kehidupan ekonomi, budaya, adat istiadat, sosial serta keseharian, yang mempunyai tata ruang serta arsitektur yang unik dan khas, maupun keunikan dari kegiatan perekonomian yang menarik serta mempunyai potensi untuk pengembangan di bidang kepariwisataan.

Jadi dari beberapa pengertian menurut para ahli bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah perdesaan yang menyuguhkan keaslian dari sisi kehidupan baik dari sosial, budaya, ekonomi, bangunan ruang, serta kegiatan keseharian yang masih kental dengan adat istiadat dan kebiasaan, yang keunikan tersebut menjadi khas sebagai daya tarik dari desa itu.

1.6 Operasional Konsep

Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata adalah pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan kebudayaan berupa peninggalan sejarah yang dijadikan untuk desa wisata dengan memberdayakan masyarakat sekitar khususnya masyarakat Desa Banjarejo untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun indicator keberhasilan pemberdayaan adalah:

1. Akses merupakan jalan masuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan desa wisata di Desa Banjarejo. Akses yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa akses fisik maupun akses non fisik.
 - 1) Akses fisik yaitu berupa tersedianya fasilitas usaha untuk masyarakat berkontribusi dalam pengelolaan desa wisata, misalnya tersedianya pelatihan, pekerjaan dan stand usaha bagi masyarakat. Akses jalan menuju ke desa wisata.
 - 2) Akses non fisik yaitu berupa minat atau tidaknya masyarakat terhadap pemanfaatan desa wisata yang berada di Desa Banjarejo.
2. Partisipasi adalah keikutsertaan dari masyarakat Desa Banjarejo dalam mengikuti pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, yang dilihat dari:
 - 1) Keikutsertaan masyarakat Desa Banjarejo dalam pengambilan keputusan

- 2) Keikutsertaan masyarakat Desa Banjarejo dalam perencanaan kegiatan
 - 3) Keikutsertaan masyarakat Desa Banjarejo dalam pelaksanaan, seperti mengikuti event festival jerami.
3. Kontrol adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan pemberdayaan di Desa Banjarejo berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang dilihat dari:
- 1) Adanya rapat evaluasi program
 - 2) Adanya tim pengelola desa wisata
 - 3) Adanya tim pengawas dalam setiap program pemberdayaan
4. Kesejahteraan, adalah tolak ukur masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata merupakan upaya Desa Banjarejo dalam mensejahterakan masyarakat.
- 1) Adanya peningkatan pendapatan masyarakat
 - 2) Tersedianya lapangan pekerjaan
 - 3) Terpenuhinya kebutuhan pendidikan

Dalam mencapai sebuah keberhasilan pemberdayaan masyarakat pasti terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam keberjalannya. Faktor pendorong merupakan hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha, atau produksi. Sedangkan faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang dapat melemahkan atau menghalangi suatu kegiatan, usaha, atau produksi. Faktor pendorong dan

penghambat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan di antara lain:

1. Faktor-faktor yang menjadi pendorong pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo yaitu:
 - a) Sumber daya alam SDA
 - b) Sarana dan prasarana.
 - c) kebijakan
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo yaitu:
 - a) Keterbatasan kemampuan manajerial.
 - b) Tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki.
 - c) Belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif atau naturalistik. Penelitian kualitatif atau naturalistik adalah penelitian yang berarti mendapatkan fenomena yang dirasakan oleh subyek penelitian, secara komprehensif dan sebagai kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang ilmiah dan dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah teknik penelitian

yang memanfaatkan teori postpositivisme sebagai landasan penelitian, penelitian kualitatif ini digunakan dalam keadaan logis (merupakan lawan dari eksperimen) dalam teknik ini instrumen kuncinya hanyalah analisis yang kemudian dalam metode pengumpulan informasi menggunakan triangulasi (bergabung). , analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil-hasilnya lebih memberi *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2012).

Berdasarkan tingkat eksplanasi, penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dalam metode kualitatif dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan atau memperoleh gambaran tentang suatu sifat dari suatu gejala masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari desain penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menggambarkan, menyelidiki, merekam, dan menguraikan keadaan yang sekarang ada atau terjadi.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat para peneliti menangkap kondisi sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diangkat. Situs penelitian pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata yang dilakukan di Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Pertimbangan untuk memilih situs ini karena Desa Banjarejo merupakan desa tertinggal di Kabupaten Grobogan namun Desa Banjarejo merupakan salah satu desa yang dinobatkan

sebagai desa wisata dan dijadikan percontohan bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Grobogan.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu yang digunakan untuk memberikan data dan kondisi dasar penelitian. Subyek penelitian juga dapat disebut sebagai informan. Teknik pemilihan subjek penelitian atau saksi-saksi yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, khususnya penentuan sampel untuk situasi ini informan dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan data dari individu yang melihat secara akurat tentang masalah yang di teliti (Moleong, 2010: 135). Subyek penelitian dalam penulisan ini adalah kepala Desa Banjarejo, ketua pokdarwis Desa Banjarejo, ketua PKK Desa Banjarejo, pedagang di sekitar desa wisata banjarejo, masyarakat Desa Banjarejo yang pernah terlibat dalam pemberdayaan.

1.7.4 Jenis Data

Penelitian pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo ini menggunakan jenis data kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Lofland (dalam Moleong, 2010:157), sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan kegiatan, selebihnya adalah informasi tambahan seperti arsip dan lain-lain. Selain itu, informasi yang digunakan juga sebagai ekspresi, gambar, foto dan statistik yang menggambarkan atau membahas

individu, kegiatan dan peristiwa. Desa setempat yang telah terlibat dengan pemberdayaan.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang diberikan secara lugas kepada pengumpul informasi (Sugiyono, 2010:225). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari kepala Desa Banjarejo, ketua pokdarwis Desa Banjarejo, ketua PKK Desa Banjarejo, pedagang di sekitar desa wisata banjarejo, masyarakat Desa Banjarejo yang pernah terlibat dalam pemberdayaan serta persepsi lapangan yang diselesaikan di instansi. dan tempat-tempat terkait lainnya. . Data primer yang diperoleh dan digunakan dapat berupa catatan-catatan dari wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan, hasil observasi dari lapangan langsung sebagai catatan tentang keadaan peristiwa dan informasi tentang informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul informasi yang dapat hasil pengolahan lebih lanjut dari informasi tambahan yang diperkenalkan dalam bentuk yang berbeda atau dari yang lain

(Sugiyono, 2010:225). Data ini digunakan untuk membantu informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara maupun dari observasi lapangan satu ke lapangan lainnya. Peneliti juga melibatkan data sekunder dari studi pustaka seperti buku-buku literatur, catatan, laporan berita, dokumen, laporan statistik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Komunitas Informasi Masyarakat Desa Banjarejo, dan berbagai sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut (Sugiyono, 2010:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah:

1. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono, 2010:231) mengartikan wawancara sebagai pertemuan dua individu untuk bertukar data dan pemikiran melalui tanya jawab sehingga kepentingan dapat dikembangkan dalam tema tertentu. Wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan informasi untuk mengarahkan studi awal untuk mengamati masalah yang harus diteliti, namun juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Dalam metode ini, peneliti melaksanakan wawancara langsung dengan para informan terkait pemberdayaan masyarakat dengan studi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

2. Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2012: 403) menyatakan bahwa observasi dasar semua ilmu pengetahuan. Peneliti dapat bekerja berdasarkan informasi, khususnya realitas tentang realitas masa kini yang didapat melalui observasi. Observasi dilakukan dengan melihat langsung ke kondisi lokasi dan memperhatikan secara langsung tentang pemberdayaan masyarakat dengan studi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. Melaksanakan pengamatan langsung pada lokasi pariwisata dan lingkungan sekitar di Desa Banjarejo. Pengamatan ini dilengkapi dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang tepat dan sah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi melalui tulisan, gambar, atau karya menakjubkan seseorang (Sugiyono, 2012: 82-83). Studi dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan meningkatkan

validitas dengan didukung oleh foto atau karya tulis akademik dan imajinatif yang ada.

4. Triangulasi/gabungan

Teknik pengumpulan data triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan informasi dari teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber yang ada. Dalam hal analisis mengumpulkan informasi dengan triangulasi, peneliti benar-benar mengumpulkan informasi yang juga menguji keabsahan informasi, khususnya memeriksa validitas informasi dengan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber informasi yang berbeda.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 430) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dari hasil penelitian lapangan yang banyak, kompleks dan rumit. Hasil dari wawancara dengan kepala Desa Banjarejo, ketua pokdarwis Desa Banjarejo,

ketua PKK Desa Banjarejo, pedagang di sekitar desa wisata banjarejo, masyarakat Desa Banjarejo yang pernah terlibat dalam pemberdayaan, serta warga masyarakat sekitar wisata yang sudah terpilih terlebih dahulu dan selanjutnya dipisahkan berdasarkan kategori atau tema mengenai pemberdayaan masyarakat dengan studi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan sebagai gambaran ringkas, uraian, grafik atau perpaduan antar kategori dan lain sebagainya. Penyajian data dilakukan untuk memperjelas apa yang telah terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut sehubungan dengan pemahaman tersebut. Informasi yang dikumpulkan secara mendalam dan menyeluruh kemudian dicari pola hubungannya untuk membuat kesimpulan yang tepat.

Hasil dari reduksi data dengan pengelompokkan berdasarkan tema tersebut, kemudian merangkainya dalam bentuk narasi mengenai pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses penelitian untuk memberi arti penting pada informasi yang telah dianalisis. Kesimpulan secara kualitatif adalah penemuan-penemuan baru yang

belum pernah ada. Penemuan dapat berupa deskripsi atau penggambaran suatu objek yang sudah redup atau gelap sehingga setelah diteliti ternyata menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif hipotesis atau teori.

1.7.8 Kualitas Data

Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan informasi yang menggunakan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi untuk tujuan akhir pengecekan atau sebagai pembanding terhadap informasi tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh (Sugiyono, 2012: 458), triangulasi dalam pengujian kredibilitas melihat informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, dengan cara ini terdapat bermacam-macam informasi dan triangulasi waktu. Model triangulasi yang dapat digunakan dalam tinjauan ini untuk menguji validitas dan pengecekan informasi adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode pemilahan informasi.

Disisi lain, model triangulasi data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik pengumpulan data. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Sugiyono, 2012:241), triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek sumber yang sama dengan berbagai metode, yang dalam penelitian ini dikemukakan melalui wawancara, observasi dan penelusuran arsip.

Sesuai (Moleong, 2010:330) menambahkan triangiulasi sumber adalah uji coba keabsahan informasi yang dilengkapi dengan melihat dan memeriksa baik tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh melalui berbagai waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

